

## **Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tugurejo Kota Semarang Dalam Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pileg & Pil DPD) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

**Kukuh Sudarmanto<sup>1\*</sup>, Muhammad Junaidi<sup>2</sup>, Kadi Sukarna<sup>3</sup>, Bambang Sadono<sup>4</sup>**  
**<sup>1-4</sup> Universitas Semarang**

\*email: kukuh.sudarmanto@usm.ac.id

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi rendahnya literasi kepemiluan, terbatasnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada pengawasan penyelenggaraan pemilu. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, pelaksanaan *pre-test*, penyuluhan hukum, pendidikan politik, diskusi interaktif, dan evaluasi menggunakan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional sebagai pemilih, bentuk partisipasi politik, serta pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Peserta juga memahami bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi mencakup keterlibatan aktif pada pendidikan pemilih, penyampaian aspirasi, dan pengawasan proses kepemiluan. Metode penyuluhan yang komunikatif dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi kepemiluan, penguatan budaya demokrasi, dan pengembangan partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas.

**Kata kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pemilu, Pendidikan Politik, Penyuluhan Hukum, Literasi Kepemiluan.

### **Abstract**

*This community service program aimed to enhance public participation in elections in Tugurejo Village, Tugu District, Semarang City, based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The partner's primary challenges included limited electoral literacy, inadequate understanding of citizens' rights and obligations as voters, and insufficient community involvement in election oversight. The program employed a participatory approach consisting of needs assessment, pre-test, legal education, political education, interactive discussions, and post-test evaluation. The results demonstrated a significant improvement in participants' understanding of constitutional voting rights, forms of political participation, and the importance of monitoring election implementation. Participants also recognized that public participation extends beyond voting to include voter education, public engagement, and participatory election oversight. The communicative and participatory learning approach effectively improved participants' legal awareness and understanding of democratic processes. Overall, the program contributed to strengthening electoral literacy, promoting democratic values, and encouraging more meaningful community participation in supporting democratic, participatory, and accountable elections.*

**Keywords:** Community Participation, General Elections, Political Education, Legal Counseling, Electoral Literacy.

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menentukan arah pemerintahan secara demokratis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih.

Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting kualitas demokrasi karena mencerminkan keterlibatan warga negara pada proses pengambilan keputusan politik.<sup>2</sup> Kehadiran masyarakat sebagai pemilih memberikan legitimasi terhadap hasil pemilu sekaligus memperkuat sistem pemerintahan yang terbentuk.<sup>3</sup> Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, sedangkan rendahnya partisipasi dapat mengurangi kualitas representasi politik serta kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Hak memilih merupakan salah satu hak konstitusional yang harus dijamin pelaksanaannya. Penggunaan hak pilih tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan hak warga negara, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab untuk menentukan pemimpin dan kebijakan publik.<sup>4</sup> Partisipasi politik tidak berhenti pada pemberian suara saat pemungutan suara, melainkan juga mencakup pengawasan, penyampaian aspirasi, pendidikan politik, dan keterlibatan aktif sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan dukungan masyarakat yang memiliki pemahaman memadai mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih. Literasi kepemiluan menjadi faktor penting agar masyarakat mampu berpartisipasi secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan hukum.<sup>5</sup> Pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk menjaga integritas pemilu sekaligus mengawasi seluruh proses penyelenggaraan agar berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, akses informasi, serta latar belakang sosial yang beragam menyebabkan pemahaman mengenai kepemiluan juga berbeda-beda.

---

<sup>1</sup> Rasyad A Parinduri, "Does Education Increase Political Participation? Evidence from Indonesia," *Education Economics* 27, no. 6 (2019): 645–57, <https://doi.org/10.1080/09645292.2019.1668914>.

<sup>2</sup> Hanan Nugroho, Agus Riwanto, and Isharyanto, "Strengthening Electoral Integrity Through Public Participation in Indonesia's Democratic System," *Hasanuddin Law Review* 8, no. 3 (2022): 294–308, <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.3668>.

<sup>3</sup> Ahmad Nur Hidayat, Nina Karlina, and Ramadhan Pancasilawan, "Innovating Electoral Metrics: A Multidimensional Statistical Model of the Indonesian Electoral Participation Index (IPP)," *Frontiers in Political Science* 8 (2026), <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1743002>.

<sup>4</sup> Muhammad Nasir and Patta Hindi Asis, "Understanding Voter Behavior in Direct Local Elections: A Case Study from the Southeast Sulawesi Islands, Indonesia," *Frontiers in Political Science* 8 (2026), <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1754738>.

<sup>5</sup> Mujahid Widian Saragih, Gusti Pirandy, and Fritz Hotman Syahmahita Damanik, "Political Participation of Millennials and Gen Z: Transformation of Youth Voter Engagement Patterns in Indonesia's Electoral Democracy System," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 10, no. 2 (2026).

Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pemilu sebagai sarana demokrasi, namun masih terdapat warga yang memandang partisipasi hanya sebatas memberikan suara di tempat pemungutan suara. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang merupakan wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Pertumbuhan kawasan industri dan permukiman menyebabkan jumlah pemilih relatif besar sehingga kualitas partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Karakteristik tersebut menjadikan wilayah ini relevan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil observasi awal bersama perangkat kelurahan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional sebagai pemilih, bentuk partisipasi politik, dan mekanisme pengawasan pemilu masih belum optimal. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa keterlibatan dalam pendidikan pemilih, pengawasan partisipatif, maupun pelaporan dugaan pelanggaran juga merupakan bagian penting dari partisipasi politik. Kondisi tersebut memerlukan upaya edukasi yang lebih sistematis.

Identifikasi kebutuhan mitra juga memperlihatkan bahwa sosialisasi kepemiluan yang diterima masyarakat masih terbatas. Informasi mengenai regulasi, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya menjaga integritas pemilu belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Perbedaan usia, tingkat pendidikan, dan akses informasi turut memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Permasalahan tersebut mendorong perlunya penyuluhan hukum dan pendidikan politik yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat. Penyampaian materi dilakukan melalui metode yang komunikatif, partisipatif, dan mudah dipahami sehingga mampu meningkatkan literasi kepemiluan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih serta berpartisipasi aktif pada setiap tahapan pemilu.

Program pengabdian kepada masyarakat menawarkan solusi melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Tahapan tersebut dirancang agar peningkatan pemahaman masyarakat dapat diukur secara objektif.

Pelaksanaan kegiatan diharapkan menghasilkan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak konstitusional sebagai pemilih, bentuk partisipasi politik, dan mekanisme pengawasan pemilu. Peningkatan literasi kepemiluan menjadi modal penting untuk membangun budaya demokrasi yang lebih berkualitas. Luaran kegiatan juga diarahkan pada publikasi ilmiah, media massa, hak kekayaan intelektual, dokumentasi kegiatan, dan laporan pengabdian sebagai bentuk diseminasi hasil pelaksanaan program.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Tugurejo dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi Pilkada, Pilpres, Pileg, dan Pemilihan Anggota DPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas.

## B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pada setiap tahapan pelaksanaan.<sup>6</sup> Pendekatan ini dipilih agar peserta terlibat secara aktif sejak identifikasi kebutuhan hingga evaluasi kegiatan sehingga materi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Metode pelaksanaan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Tahap pertama diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Kelurahan Tugurejo untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat terkait tingkat partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih, bentuk partisipasi politik, serta kebutuhan edukasi kepemiluan. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menyusun strategi penyampaian materi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sebagai mitra kegiatan.

Tahap berikutnya dilakukan pengukuran awal melalui *pre-test* kepada seluruh peserta. Instrumen evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hak konstitusional sebagai pemilih, bentuk partisipasi dalam pemilu, serta pemahaman terhadap

---

<sup>6</sup> Fitri Yulianti, Dwi Putri Permatasari, and Siti Aisyah, "Participatory Approach in Community Service Programs: Strengthening Community Engagement and Sustainable Outcomes," *International Journal of Evaluation and Research in Education* 13, no. 2 (2024): 1021–30, <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i2.26891>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>7</sup> Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal pemilu sebagai sarana demokrasi, namun pemahaman mengenai bentuk partisipasi masyarakat masih terbatas pada penggunaan hak pilih saat pemungutan suara.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan politik mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penyampaian materi menggunakan metode ceramah, presentasi, dan pemberian contoh kasus aktual agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta. Materi yang diberikan meliputi dasar hukum penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban warga negara sebagai pemilih, pentingnya penggunaan hak pilih, serta berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan mengenai mekanisme pemutakhiran daftar pemilih, penggunaan hak pilih, pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, hingga penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Diskusi berlangsung secara terbuka sehingga tercipta komunikasi dua arah antara narasumber dan masyarakat serta meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Tahap akhir berupa evaluasi menggunakan *post-test* dengan instrumen yang sama seperti *pre-test*. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan masyarakat setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, serta pentingnya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan dan diskusi interaktif mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mendukung tercapainya tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu harus diawali dengan penguatan pemahaman mengenai hak dan

---

<sup>7</sup> Yuliana, Siti Aminah, and Nur Hidayah, "The Effectiveness of Pre-Test and Post-Test Evaluation in Community Education Programs," *Journal of Community Education* 9, no. 1 (2022): 44–56, <https://doi.org/10.15294/jce.v9i1.54892>.

kewajiban sebagai warga negara. Hasil identifikasi kebutuhan memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengenal pemilu sebagai sarana demokrasi, namun belum memahami secara utuh bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi kepiluan masih memerlukan penguatan melalui kegiatan edukasi yang berkesinambungan.

Temuan awal juga menunjukkan bahwa sebagian peserta masih memandang partisipasi masyarakat hanya sebatas memberikan suara pada hari pemungutan suara. Padahal, penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan.<sup>8</sup> Rendahnya pemahaman mengenai bentuk partisipasi tersebut berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena masyarakat belum memanfaatkan seluruh hak konstitusional yang dimiliki.

Pelaksanaan penyuluhan hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Materi yang disampaikan tidak hanya menjelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga menguraikan hak dan kewajiban warga negara sebagai pemilih.<sup>9</sup> Penyampaian materi secara sistematis memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sehingga peserta mampu memahami hubungan antara hak politik dan tanggung jawab sebagai warga negara.



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi Narasumber

Metode ceramah yang dipadukan dengan presentasi dan contoh kasus aktual terbukti membantu peserta memahami materi secara lebih mudah. Penyampaian contoh mengenai pelaksanaan pemilu yang demokratis memberikan gambaran nyata mengenai berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut mendorong peserta untuk menghubungkan materi

<sup>8</sup> Muhammad Afdhal Arrazak and Muhammad Fachri Adnan, "The Impact of Social Media Campaigns, Digital Literacy, and Political Efficacy on Generation Z's Political Participation in the Local Elections," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 10, no. 2 (2026): 129–39, <https://doi.org/10.24036/jess.v10i2.659>.

<sup>9</sup> Agust Jovan Latuconsina, "The Influence of Digital Democracy, Political Literacy, and Post-Truth Politics on Gen Z Political Participation in the 2024 Elections in Indonesia," *F1000Research* 15 (2026): 1148, <https://doi.org/10.12688/f1000research.185707.1>.

yang diterima dengan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Diskusi interaktif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan mengenai berbagai persoalan kepemiluan. Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan mekanisme pemutakhiran daftar pemilih, penggunaan hak pilih, pengawasan penyelenggaraan pemilu, hingga penanganan dugaan pelanggaran. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

Komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jawaban yang disampaikan berdasarkan ketentuan hukum disertai contoh penerapan di lapangan membuat materi lebih mudah dipahami. Proses tersebut juga memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.



Gambar 2. Kegiatan Foto Bersama dengan Peserta dan Narasumber PkM

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara pada hari pemungutan suara. Peserta memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya mengikuti pendidikan pemilih, menyampaikan aspirasi secara demokratis, serta berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Perubahan pemahaman tersebut menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan penyuluhan hukum dan pendidikan politik.

Pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* memberikan gambaran yang objektif mengenai perubahan tingkat pengetahuan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional sebagai pemilih, bentuk partisipasi masyarakat, serta

pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian materi.

Peningkatan literasi kepemiluan juga tercermin dari kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah diterima selama kegiatan berlangsung. Sebagian besar peserta mampu menguraikan pengertian partisipasi masyarakat dalam pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>10</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai sesuai dengan rencana kegiatan.

Kegiatan pengabdian memberikan manfaat tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi pemerintah kelurahan sebagai mitra pelaksanaan. Hasil kegiatan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pendidikan politik yang lebih berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah kelurahan juga memperkuat upaya peningkatan kualitas demokrasi melalui kegiatan edukasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari penggunaan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi. Pendekatan tersebut memungkinkan materi yang disampaikan lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Keterlibatan aktif peserta selama proses pembelajaran juga menciptakan suasana yang komunikatif sehingga tujuan kegiatan lebih mudah dicapai.<sup>11</sup>

Target luaran yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat merupakan sasaran utama yang didukung oleh berbagai luaran akademik dan praktis. Selain peningkatan pengetahuan masyarakat, kegiatan juga diarahkan menghasilkan publikasi ilmiah, publikasi media massa, hak kekayaan intelektual, dokumentasi video, dan laporan pengabdian sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara langsung lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibandingkan penyampaian informasi secara pasif.<sup>12</sup> Interaksi antara narasumber dan peserta menciptakan proses pembelajaran yang mendorong masyarakat memahami pentingnya menjaga kualitas demokrasi

---

<sup>10</sup> Ksatriawan Zaenuddin et al., "Increasing Voter Participation and Its Obstacles: An Analysis of Youth Organizations in Political Education in the Makassar Mayoral Election," *Tamalanrea: Journal of Government and Development* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.43527>.

<sup>11</sup> Andreas Videbæk Jensen, "Educating for Democracy? Going to College Increases Political Participation," *British Journal of Political Science*, 2025, 1–20.

<sup>12</sup> Cameron J Arnzen, "Education and the Unequal Costs of Voting: Administrative Burdens and Democratic Participation," *Policy Studies Journal*, 2026, <https://doi.org/10.1111/psj.70106>.

melalui penggunaan hak pilih secara bertanggung jawab dan keterlibatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Temuan kegiatan juga mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan keberlanjutan program edukasi. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala akan membantu masyarakat mengikuti perkembangan regulasi pemilihan sekaligus memperkuat budaya demokrasi pada tingkat lokal. Dukungan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan memilih.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai tujuan yang direncanakan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif terhadap pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih serta pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pemilu. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan pendidikan politik merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat kualitas demokrasi pada tingkat masyarakat.

#### **D. SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai hak serta kewajiban sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, pendidikan politik, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik, tidak hanya menggunakan hak pilih tetapi juga berperan dalam pengawasan dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang partisipatif dan komunikatif efektif mendukung peningkatan literasi pemilihan serta memperkuat budaya demokrasi yang lebih berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arnzen, Cameron J. "Education and the Unequal Costs of Voting: Administrative Burdens and Democratic Participation." *Policy Studies Journal*, 2026. <https://doi.org/10.1111/psj.70106>.  
Arrazak, Muhammad Afdhal, and Muhammad Fachri Adnan. "The Impact of Social Media

- Campaigns, Digital Literacy, and Political Efficacy on Generation Z's Political Participation in the Local Elections." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 10, no. 2 (2026): 129–39. <https://doi.org/10.24036/jess.v10i2.659>.
- Hidayat, Ahmad Nur, Nina Karlina, and Ramadhan Pancasilawan. "Innovating Electoral Metrics: A Multidimensional Statistical Model of the Indonesian Electoral Participation Index (IPP)." *Frontiers in Political Science* 8 (2026). <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1743002>.
- Jensen, Andreas Videbæk. "Educating for Democracy? Going to College Increases Political Participation." *British Journal of Political Science*, 2025, 1–20.
- Latuconsina, Agust Jovan. "The Influence of Digital Democracy, Political Literacy, and Post-Truth Politics on Gen Z Political Participation in the 2024 Elections in Indonesia." *F1000Research* 15 (2026): 1148. <https://doi.org/10.12688/f1000research.185707.1>.
- Nasir, Muhammad, and Patta Hindi Asis. "Understanding Voter Behavior in Direct Local Elections: A Case Study from the Southeast Sulawesi Islands, Indonesia." *Frontiers in Political Science* 8 (2026). <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1754738>.
- Nugroho, Hanan, Agus Riwanto, and Isharyanto. "Strengthening Electoral Integrity Through Public Participation in Indonesia's Democratic System." *Hasanuddin Law Review* 8, no. 3 (2022): 294–308. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.3668>.
- Parinduri, Rasyad A. "Does Education Increase Political Participation? Evidence from Indonesia." *Education Economics* 27, no. 6 (2019): 645–57. <https://doi.org/10.1080/09645292.2019.1668914>.
- Saragih, Mujahid Widian, Gusti Pirandy, and Fritz Hotman Syahmahita Damanik. "Political Participation of Millennials and Gen Z: Transformation of Youth Voter Engagement Patterns in Indonesia's Electoral Democracy System." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 10, no. 2 (2026).
- Yuliana, Siti Aminah, and Nur Hidayah. "The Effectiveness of Pre-Test and Post-Test Evaluation in Community Education Programs." *Journal of Community Education* 9, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/10.15294/jce.v9i1.54892>.
- Yulianti, Fitri, Dwi Putri Permatasari, and Siti Aisyah. "Participatory Approach in Community Service Programs: Strengthening Community Engagement and Sustainable Outcomes." *International Journal of Evaluation and Research in Education* 13, no. 2 (2024): 1021–30. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i2.26891>.
- Zaenuddin, Ksatriawan, Asbudi, Ikhsan Hidayat, and Andy Wardana. "Increasing Voter Participation and Its Obstacles: An Analysis of Youth Organizations in Political Education in the Makassar Mayoral Election." *Tamalanrea: Journal of Government and Development* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.43527>.